KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10/KEP/KIP/X/2021

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik;
b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 04/KEP/KIP/VI/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021;

* Komisi Informasi Pusat *

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 21 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2021, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, onyektif, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

KEDUA : Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori Badan Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang dihasilkan dari setiap tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sebagaimana tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi ini.

KETIGA : Keputusan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan tidak dapat diganggu gugat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021

KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA,

GEDE NARAYANA

51a9b a449e 19e26f

Digitally signed by 51a9ba449e19e26f
DN: cn=51a9ba449e19e26f
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-10-27 13:46+07:00

Komisi Informasi Pusat

LEMBAGA NON STRUKTURAL		
NO	**BADAN PUBLIK**	**NILAI**
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	89,33
2	Komisi Aparatur Sipil Negara	89,27
3	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	89,20
4	Badan Amil Zakat Nasional	87,11
5	Ombudsman Republik Indonesia	85,29
6	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	81,35
7	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	80,42

PEMERINTAH PROVINSI		
NO	**BADAN PUBLIK**	**NILAI**
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	88,95
2	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	88,45
3	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	88,38
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	88,00
5	Pemerintah Provinsi Lampung	87,98
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	87,55
7	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	87,05
8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	85,43
9	Pemerintah Provinsi Gorontalo	81,96
10	Pemerintah Provinsi Jambi	81,41
11	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	81,03

BADAN USAHA MILIK NEGARA		
NO	**BADAN PUBLIK**	**NILAI**
1	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	88,04
2	PT Industri Kereta Api (Persero)	87,90
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	87,24
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	87,21
5	PT Hutama Karya (Persero)	85,77
6	PT PAL Indonesia (Persero)	85,34
7	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	85,30
8	PT Dahana (Persero)	85,17
9	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	82,61
10	PT Sucofindo (Persero)	81,50
11	PT Pegadaian (Persero)	81,32
12	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	80,74
13	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	80,57
14	PT Taspen (Persero)	80,46
15	PT Boma Bisma Indra (Persero)	80,44